

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KONFLIK  
SOSIAL PERANG ANTARA SUKU LANNY JAYA DAN SUKU NDUGA  
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Harishanty Lintang Auliasari Wijaya

NPP. 30.1435

*Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email : [wijayaaling2@gmail.com](mailto:wijayaaling2@gmail.com)

Pembimbing skripsi : Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Tanah Papua is one of the areas where various social problems still frequently arise. One of them is the social conflict of tribal wars which can arise from cultural, political, economic and social aspects. The tribal war that occurred in Jayawijaya Regency on January 8 2022 occurred between the Lanny Jaya Tribe and the Nduga Tribe, as released on the morning news of RRI Wamena on January 9 2022 at 06.30 WIT that the main cause was the delay in paying the dowry which spread to the murders. This is the basis of the research, as well as the role of the regional government in overcoming the social conflict of war between the Lanny Jaya and Nduga tribes in Jayawijaya Regency, Papua Mountains Province. **Purpose:** This research was conducted to find out the causes of social conflict in tribal wars and to find out the role of local government in overcoming social conflict in war between the Lanny Jaya and Nduga tribes in Jayawijaya Regency, Papua Mountains Province. **Method:** This study uses a qualitative method. Researchers used observation techniques, interviews, and documentation. Existing data were analyzed by collecting data, analyzing data, and drawing conclusions. **Result:** The results of this study are the causes of tribal wars, namely the payment of dowry from the men (Nduga tribe) which has not been paid off to the women (Lanny Jaya tribe) within the agreed timeframe, kidnapping of women (Lanny Jaya tribe) by the men (Nduga Tribe) and revenge as a result of the men (Nduga Tribe) being killed by the women (Lanny Jaya Tribe). **Conclusion:** The role of the local government is to carry out effective communication in the form of coordination with forkopimda elements to resolve tribal wars between the Lanny Jaya and Nduga tribes, tribal wars are resolved according to custom, namely by paying fines in the form of money and pigs as customary symbols and the local government accepts the community's idea by signing a peace statement.

**Keywords:** *Role, Local Government, Tribal War, Regional Leadership Communication Forum (forkopimda)*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tanah Papua adalah salah satu daerah yang masih sering muncul berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah konflik sosial perang suku yang bisa timbul dari aspek budaya, politik, ekonomi maupun sosial. Perang suku yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Januari 2022 lalu terjadi antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga, sebagaimana dirilis berita pagi RRI Wamena tanggal 9 Januari 2022 pukul 06.30 WIT bahwa penyebab utamanya yaitu keterlambatan pembayaran mas kawin yang merembet hingga ke pembunuhan. Inilah yang menjadi dasar penelitian, serta peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial perang suku dan mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang ada dianalisis dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. **Hasil/temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah penyebab perang suku yaitu pembayaran mas kawin dari pihak laki-laki (Suku Nduga) yang belum lunas kepada pihak perempuan (Suku Lanny Jaya) dalam jangka waktu yang disepakati, penculikan pihak perempuan (Suku Lanny Jaya) oleh pihak laki-laki (Suku Nduga) dan balas dendam sebagai akibat pihak laki-laki (Suku Nduga) yang dibunuh oleh pihak perempuan (Suku Lanny Jaya). **Kesimpulan:** Peran pemerintah daerah yaitu melakukan komunikasi yang efektif dalam bentuk koordinasi dengan unsur forkopimda untuk menyelesaikan perang suku antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga, perang suku diselesaikan secara adat yaitu dengan membayar denda berupa uang dan babi sebagai simbol adat dan pemerintah daerah menerima ide masyarakat dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian.

**Kata Kunci :** Peran, Pemerintah Daerah, Perang Suku, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda)

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah digunakan dasar konstitusional Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Negara ini. Di penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan saja. Implementasi konsep negara hukum dalam praktek penyelenggaraan Negara, menempatkan hukum sebagai panglima/pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan negara (Fadjar, 2004).

Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas pada daerah bertujuan untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dan pemberdayaan. Selain itu daerah diharapkan bisa menumbuhkan daya saing dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam NKRI. Indonesia adalah negara majemuk, yang berarti ada berbagai suku, ras, agama dan golongan. Perbedaan cara pandangan dan tujuan bisa menjadi masalah tetapi dapat diselesaikan apabila seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama. Dari perbedaan pandangan itu sering muncul konflik sosial.

Tanah Papua adalah salah satu daerah yang masih sering muncul berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah konflik sosial, di Papua sangat bermacam mulai dari aspek budaya, politik, ekonomi maupun sosial. Masalah perzinahan atau perselingkuhan, pemekaran wilayah, pembunuhan serta kematian tidak wajar, rekayasa konflik dan dendam yang mendalam adalah beberapa penyebab perang suku di pedalaman Papua. Dari zaman nenek moyang, perang suku telah terjadi dan menjadi tradisi bagi suku pedalaman untuk bisa bertahan hidup.

Perang suku terjadi di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Januari 2022 lalu terjadi antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga, sebagaimana dirilis berita pagi RRI Wamena tanggal 9 Januari 2022 pukul 06.30 WIT bahwa penyebab utamanya belum diketahui secara pasti yang mengakibatkan terjadi peperangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, sistem penanganan konflik yang digunakan di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya lebih mengarah kepada pendekatan berbasis keamanan yaitu dikerahkannya aparat keamanan berupa TNI/Polri. Di samping itu, regulasi terkait dalam berhadapan dengan penanganan setiap konflik masih bersifat parsial, seperti masih setengah-setengah untuk mencakup keseluruhan, hanya

berupa bentuk peraturan perundang-undangan pemerintah daerah belum terimplementasikan dengan baik.

Sebagaimana berita pagi RRI Wamena, banyak masyarakat yang menjadi korban dari kejadian tersebut, dalam hal ini pemerintah daerah harus aktif dalam pencegahan konflik. Masalah seperti itu sangat lumrah di Wamena yang sering menjadi tempat perang suku berlangsung. Hal ini dikarenakan Wamena merupakan ibu kota dari Kabupaten Jayawijaya, sehingga seluruh kegiatan sering dilakukan di pusat kota. Butuh peran maksimal dan langkah-langkah pencegaham dari pemerintah daerah. Apalagi perang suku antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga sama-sama berada dalam wilayah adat yang sama yakni wilayah adat lapago.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengatasi konflik sosial perang antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Peran memiliki arti seseorang yang sedang bertindak melakukan aktifitas dengan harapan memberikan sebuah manfaat dalam kontribusinya di masyarakat. Jadi, setiap individu mempunyai tindakan penting bagi orang lain. Berdasarkan pendapat dari Poerwadarminta, peran adalah aktifitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok dalam sebuah peristiwa. Bisa disimpulkan peran adalah perilaku yang dilakukan seseorang, peranan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilaksanakan seseorang agar memberikan manfaat dalam sebuah kedudukan dalam suatu masyarakat. Peranan dan kedudukan sebagai suatu hal penting dilakukan dengan sebuah pengetahuan dan keduanya tidak bisa dipisah.

Dalam penelitian ini, masalah yang diambil adalah perang suku yang disebabkan mas kawin yang belum dibayar kepada pihak keluarga perempuan sehingga berlanjut pada perselingkuhan dan penculikan. Dari hal itu diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Namun, pihak lelaki merasa tersinggung dengan perkataan dari pihak keluarga perempuan. Oleh karena itu, pertumpahan darah pun tidak dapat dihindari. Terjadi pertikaian saling serang dengan menggunakan senjata tradisional berupa parang, tombak dan juga panah yang mengakibatkan pihak lelaki meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut keluarga pihak lelaki (masyarakat Nduga) merasa tidak terima keluarganya terbunuh dan mulai melakukan aksi serang menyerang terhadap pihak pelaku (masyarakat lanny jaya) yang bermukim di Kampung Wesakma.

Perang suku berlangsung selama 5 hari, hal ini dikarenakan pihak suku Nduga belum terima karena jumlah korban jiwa belumimbang antara kedua suku. Oleh karena itu, total korban dalam perang suku anantara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga berjumlah 28 orang, dimana 2 orang meninggal dunia dan lainnya terkena

luka-luka parah. Selain korban jiwa, ada juga kerugian materil berupa 40 rumah dan honai yang habis terbakar dan rusak, 2 unit mobil dan 10 unit motor.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang suku antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga. Langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam penyelesaian konflik.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait peran-peran pemerintah bagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya belum pernah ada sebelumnya. Peneliti akan mengkaji dari beberapa kumpulan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan judul. Pertama, Uci Zahrafani (2017) dengan judul Upaya Pemerintah dalam Menangani Konflik Antar Suku di Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan melaksanakan observasi, wawancara dan pengumpulan data yang berhubungan dengan konflik. Hasilnya ialah banyak konflik suku yang disebabkan kecemburuan sosial dan ketersinggungan, serta faktor perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Maka pemerintah menggunakan mediator untuk membantu mengumpulkan fakta dan memperjelas masalah secara terpadu (mediasi) dan memperbaiki hubungan kedua pihak dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik.

Kedua, Krinus Kim (2019) berjudul Perang Antar Suku dan Resolusi Konflik di Kabupaten Mimika Papua. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Dengan hasil, perang antar suku dimanfaatkan pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), dan PTFI untuk kepentingan politik, ekonomi, jabatan/posisi dll. Karena itu masyarakat mengatakan bahwa pemerintah daerah gagal menangani perang suku di Mimika.

Ketiga, Sitti Mutia Faradillah Tukwain (2021) dengan judul Metode Resolusi Konflik Antar Suku oleh Kepala Suku di Kota Sorong. Metode yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologi. Hasil yang didapatkan yaitu faktor penyebab konflik adalah karena perbedaan antar individu, antar kebudayaan dan kepentingan dan metode resolusi konflik antar suku oleh kepala suku.

Keempat, Utricia Simatupang (2022) berjudul Kinerja Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana Konflik Sosial 23 September 2019 Di Kabupaten Jayawijaya. Metode penelitian kualitatif, digunakan triangulasi teknik dalam pengumpulan data. Hasil yang diperoleh dengan mengukur kinerja organisasi berdasarkan 5 indikator: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Kesimpulan, kinerja Dinas Sosial merehabilitasi Jayawijaya pasca bencana telah memenuhi 4 indikator yang hampir sesuai harapan.

Namun, indikator produktivitas belum mencapai target karena kendala dalam Sumber Daya (manusia, alam, dan sarana prasarana) yang kurang memadai.

Dan yang terakhir, Andreas Aryanto Ate (2022) dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik perang suku dikabupaten Mimika Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif berupa observasi dan wawancara. Hasilnya, perang suku terjadi karena tuduhan dan sikap kecurigaan dan egoisme serta komunikasi yang tidak efektif. Diperlukan pengawasan pemerintah daerah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan menggunakan keadaan yang baru serta informan yang lebih banyak dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokasi penulis. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda yaitu teori peran menurut Levinson dalam Soekanto (2012).

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab perang suku dan juga peran pemerintah daerah dalam mengatasi perang antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.

### **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang artinya peneliti mengambil data yang ada dilapangan secara sistematis. Penulis dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, penulis melakukan wawancara pada 12 orang informan, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Penanganan Konflik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Suku, Kapolres Jayawijaya, Dandim Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Masyarakat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis mengemukakan penyebab terjadinya perang suku dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang suku di Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan teori peran menurut Levinson dalam Soekanto yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah meliputi peran adalah norma-norma, peran adalah suatu konsep dan peran sebagai perilaku individu. Berikut pembahasannya :

### **3.1 Peran adalah norma-norma**

Secara umum norma adalah pedoman perilaku untuk dapat melangsungkan kehidupan bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma adalah sebuah petunjuk dan patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial kepada sesama masyarakat. Hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat mencerminkan adanya hubungan antara peranan individu dengan norma-norma yang ada. Peranan diatur oleh norma yang berlaku. Contohnya, norma kesopanan dan norma adat. Semua masyarakat mempunyai adat dengan ciri khasnya masing-masing. Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi dan peran tiap-tiap individu di lingkungan sekitarnya tidak terlepas dari eksistensinya dalam setiap aktifitas yang dilakukannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok. Dimana dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peran yang penting. Karena pemimpinlah yang mempunyai kewajiban lebih untuk mengarahkan dan memprovokasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pemerintah jayawijaya khususnya Bupati Jayawijaya memiliki peran besar dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perang suku yang terjadi. Penyelesaian dilakukan dengan mediasi antara kedua belah pihak apakah ingin diselesaikan secara adat atau hukum. Ada 23 korban jiwa dan kerugian materil berupa 2 unit mobil, 10 unit motor, dan rumah dan honai sebanyak 40 buah. Berdasarkan hal tersebut, dari pihak pemerintah daerah mengadakan pertemuan antara aparat keamanan dan juga Bupati untuk membahas mengenai penyelesaian konflik perang suku ini. Pada perang suku kali ini, terlihat adanya koordinasi antara TNI, Polri, dan juga pemerintah dalam mengamankan masyarakat. Saat perang terjadi, pihak TNI membantu untuk memback up personil Polres Jayawijaya dalam mengamankan lingkungan sekitar perang. Keesokan harinya, dilakukan pertemuan Forkopimda terkait perdamaian secara adat antara masyarakat Nduga dan Lanny Jaya. Hasil dari pertemuan ini adalah Bupati Nduga dan Bupati Lanny Jaya wajib menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua kubu yang berisikan sanksi hukum bila masalah terulang Kembali akan terkena pidana hukum bagi para pelaku dari kedua kubu dan alat perang akan langsung disita oleh pihak keamanan.

### **3.2 Peran adalah suatu konsep**

Aristoteles menyebutkan bahwa konsep adalah penyusunan utama dalam pembentukan filsafat pemikiran manusia dan pengetahuan ilmiah. . Dalam penyelesaian konflik perang suku ini, pemerintah berencana untuk sering melakukan agenda pertemuan dengan masyarakat-masyarakat desa atau kepala suku untuk membahas permasalahan atau kendala yang sedang dihadapi dilingkungan masyarakat. Dalam hal ini seorang pemimpin harus berani mengambil resiko dalam membuat suatu keputusan untuk menghasilkan suatu perubahan yang

lebih baik terhadap masalah yang ada. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap jalannya suatu kehidupan bermasyarakat, maka dari itu ketepatan peran seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Apalagi dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik perang suku ini, pemerintah memiliki berbagai pertimbangan agar kedua belah pihak merasa adil. Jadi keputusan dari pemerintah adalah menyelesaikan konflik ini secara adat. Penyerahan bantuan kepada masyarakat suku Lanny Jaya sebesar Rp 500.000.000,-. Dimana dari Bupati Jayawijaya dan Lanny Jaya masing-masing memberi Rp 100.000.000,-. Sisanya berasal dari Bupati Nduga sebesar Rp 300.000.000 dan 30 ekor babi, karena merupakan pemicu awal terjadinya perang suku. Bantuan yang diberikan kepada pihak masyarakat Lanny Jaya bukan sebagai ganti rugi melainkan digunakan untuk membeli bahan makanan bagi masyarakat.

### **3.3 Peran adalah perilaku individu**

Artinya peran adalah perilaku individu dalam institusi sosial. Dalam hal ini, masyarakat diibaratkan sebagai panggung dan individu sebagai aktor dalam masyarakat, dimana mereka harus memainkan peran masing-masing yang berbeda. Dalam hal ini peran sebagai perilaku individu berlaku dalam peran untuk mengelola ide dan rencana. Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat tentang perang suku yang sering terjadi. Apalagi jika berdampak negative bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta aparat keamanan memiliki ide dan rencana yaitu sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau kepala suku untuk memantau keadaan.

Sedangkan, ide dari masyarakat sendiri yaitu jika hal ini terulang kembali, pelaku dari suku manapun itu harus langsung diproses secara hukum dan ikut membayar ganti rugi yang telah dibuatnya, bukan dari pihak pemerintah yang membayar ganti rugi tetapi dari pihak pelaku. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita tidak terlepas dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah aspek penting yang mampu memberi dampak yang sangat signifikan bagi setiap individu dalam kelompok masyarakat untuk selalu berperilaku ataupun bertindak dan memungkinkan adanya perubahan-perubahan dari perilaku tiap individu.

Oleh karena itu, apapun keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Karena keputusan pemerintah tentu bersifat baik dan untuk menjaga keamanan masyarakatnya. Hal sekecil apapun yang dilakukan pemerintah tentu punya pengaruh di lingkungan sosial masyarakat. Apalagi dalam hal mengatasi perang suku, tentu peran pemerintah yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus bijak dalam membuat keputusan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan masalah baru kedepannya.



Selain itu, pemerintah harus bersikap tegas pada pelaku yang memicu adanya keributan, jangan dibiarkan agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

### **3.4 Diskusi temuan utama penelitian**

Tanah Papua adalah salah satu daerah yang masih sering muncul berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah konflik sosial, di Papua sangat bermacam mulai dari aspek budaya, politik, ekonomi maupun sosial. Beberapa tahun belakangan ini, konflik di Papua muncul akibat perbedaan budaya, suku dan golongan suatu kelompok yang dianggap suatu masalah yang bisa merugikan bahkan melanggar norma pada suku-suku disana. Masalah perzinahan atau perselingkuhan, pemekaran wilayah, pembunuhan serta kematian tidak wajar, rekayasa konflik dan dendam yang mendalam adalah beberapa penyebab perang suku di pedalaman Papua. Hal ini serupa dengan penelitian Uci Zahrafani (2017) dengan judul Upaya Pemerintah dalam Menangani Konflik Antar Suku di Kabupaten Kutai Timur. Dimana hasilnya ialah banyak konflik suku yang disebabkan kecemburuan sosial dan ketersinggungan, serta faktor perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Maka pemerintah menggunakan mediator untuk membantu mengumpulkan fakta dan memperjelas masalah secara terpadu (mediasi) dan memperbaiki hubungan kedua pihak dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik. Pada penelitian penulis, pemerintah daerah jayawijaya juga menggunakan system mediasi untuk mengatasi perang suku antara suku lanny jaya dan suku nduga. Selain itu, penyebab perang suku juga disebabkan karena ketersinggungan keluarga laki-laki atas ucapan pihak keluarga perempuan yang kemudian masalah membesar sampai terjadi peperangan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Jayawijaya sering terjadi suatu permasalahan terkhususnya perang suku. Salah satu perang yang paling diingat adalah Wamena berdarah. Tragedi itu terjadi di Wamena Kabupaten Jayawijaya pada 6 Oktober 2000 yang merenggut banyak korban sipil maupun TNI/Polri. Setelah itu, banyak terjadi perang suku lainnya tetapi tidak separah Wamena berdarah di tahun 2000. Perang suku biasanya lama dan menghabiskan banyak korban nyawa, lalu penyelesaiannya pun sangat cepat dan mudah diselesaikan melalui hukum adat setempat. Sesuai dengan penelitian Krinus Kim (2013) Masalah perang antar suku di Provinsi Papua kerap kali terjadi, terutama di Pegunungan Papua. Kabupaten Mimika hampir dikatakan sering terjadi perang antar suku dengan berbagai macam permasalahan di antaranya adalah masalah tanah atau hak ulayat, masalah harta wanita, masalah jabatan atau posisi, masalah pemilihan kepala daerah, kecemburuan sosial, dendaman dan lain-lain Oleh karena itu, pemerintahan daerah perlu aktif dalam pencegahan suatu konflik perang suku yang dapat menyebabkan banyak warga yang menjadi korban dalam suatu konflik tersebut.

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi terbuka tentang ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat secara rutin, terutama masyarakat suku pedalaman. Fungsinya agar cara berpikir mereka bisa lebih luas dan lebih menghargai sesama manusia lainnya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin atau damai, bukan langsung dengan kekerasan walaupun itu merupakan adat mereka sehingga masyarakat sekitar bisa hidup dengan aman dan damai tanpa adanya rasa takut. Hal ini merupakan pendekatan humanis yang bisa pemerintah lakukan agar lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya juga harus lebih meningkatkan fungsi koordinasi lintas forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), terutama dengan forkopimda Kabupaten Lanny Jaya dan forkopimda Kabupaten Nduga.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari indikator yang dibahas dalam pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1. Penyebab perang suku antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan**
  - a. Pembayaran mas kawin dari pihak laki-laki (Suku Nduga) yang belum lunas kepada pihak perempuan (Suku Lanny Jaya) dalam jangka waktu yang disepakati.
  - b. Penculikan pihak perempuan (Suku Lanny Jaya) oleh pihak laki-laki (Suku Nduga) karena pihak laki-laki merasa cemburu pihak perempuan berselingkuh.
  - c. Balas dendam sebagai akibat pihak laki-laki (Suku Nduga) yang dibunuh oleh pihak perempuan (Suku Lanny Jaya)
- 2. Peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang antara suku nduga dan suku lanny jaya di Kabupaten Jayawijaya provinsi papua pegunungan**
  - a. Pemerintah daerah telah melakukan komunikasi yang efektif dalam bentuk koordinasi dengan unsur forkopimda untuk menyelesaikan solusi perang suku antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga.
  - b. Pengambilan keputusan penyelesaian masalah perang suku diselesaikan secara adat yaitu dengan membayar denda berupa uang dan babi sebagai simbol adat mereka.
  - c. Pemerintah daerah menerima ide masyarakat dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang berisikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, jika terjadi maka pelaku akan langsung diproses secara hukum.

- d. Pemerintah daerah telah mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kondusifitas daerah yakni secara persuasif yaitu berupa mediasi dan kesepakatan penegakan hukum jika konflik yang sama terulang kembali.

**Keterbatasan penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu akses informasi. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian belum memiliki koneksi jaringan yang bagus, sehingga menghambat dalam mencari informasi. Selain itu, karena perang suku ini melibatkan 2 suku dari kabupaten yang berbeda, sehingga untuk menjangkau informasi ke kabupaten tersebut sangat sulit karena jarak yang jauh dan juga jalan yang belum memadai.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang suku.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jayawijaya, Kapolres dan Dandim Jayawijaya beserta jajarannya yang memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Ilmar 2009. *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Chairil, Tangguh 2020. *Konflik Papua : Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan Dengan Pendekatan Humanis*.
- Fadjar, Muktie 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang : Bayumedia
- Liauw, Gasper 2010. *The Papua Paradoks*. Yogyakarta/ Andi
- Saiful, 2016. *Meneliti Perang Suku di Papua*.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*  
Bandung: Alfabeta
- Tambunan, 2015. *Kepemimpinan: Pengertian, Unsur, Prinsip, Tingkat & Gaya*